

# Biaya Pemeliharaan Mengganjal Aset

**MEMPAWAH.** Bupati Pontianak H Ria Norsan mengungkapkan berbagai persoalan yang mengakibatkan terjadinya kenaikan total jumlah aset Pemerintah Kabupaten Pontianak tahun 2011.

Permasalahannya itu disampaikan dalam sidang paripurna Jawaban Bupati Pontianak, terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD di Gedung DPRD, Kamis (12/7) siang.

"Terdapat beberapa kelemahan yang menjadi kendala terhadap pengelolaan dan penataan manajemen aset daerah," ujar Norsan.

Kendala itu, misalnya menyangkut pengamanan aset

daerah. Seperti pemeliharaan aset dan pengamanan hukum. Menyikapi permasalahan itu, pemerintah mengambil kebijakan dengan menyesuaikan ketentuan aset, terhadap peraturan pemerintah daerah. Khususnya yang mengatur tentang pedoman aset daerah serta petunjuk pelaksanaannya.

"Kebijakan lainnya, kami akan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk mendukung kebijakan tersebut. Caranya dengan meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan formal. Beberapa PNS akan melanjutkan pendidikan S2 manajemen pengelolaan

aset," paparnya.

Norsan mengungkapkan akan menyelesaikan persoalan aset yang setiap tahunnya menjadi temuan BPK. Dirinya akan melakukan peningkatan kapabilitas pengelolaan aset yang ada di jajaran SKPD.

"Kita akan memanfaatkan pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (Simbada) atau sistem lainnya, diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah," jelas Norsan.

Pemerintah Kabupaten Pontianak berjanji segera menyelesaikan permasalahan aset. Seperti serah terima aset antara Pemkab Pontianak dengan Pemkab Kubu

Raya serta TNI-AD.

"Aset tetap yang harus dilakukan tukar menukar dengan Pemerintah Kubu Raya sebesar Rp154 miliar lebih. Sedangkan kepada TNI-AD yakni Rp5 miliar lebih," papar Norsan.

Menyangkut penagihan pembayaran aset dari mantan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak sedang mengupayakan penyelesaiannya. bahkan sebagian masalah sudah terealisasi. Penagihan dilakukan melalui surat Bupati Pontianak," tegasnya.

Hasil audit BPK terhadap penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Pontianak tahun 2011, mengungkap adanya penambahan total aset daerah.

Dari Rp825,59 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1,118 triliun atau naik 35,47 persen. Terdiri dari aset lancar Rp74,44 miliar, investasi jangka panjang Rp17,85 miliar, aset tetap Rp865,70 miliar dan aset lainnya Rp160,96 miliar.

Kenaikan aset tetap hanya 13,45 persen atau 102,63 miliar yang terdiri dari aset tanah sebesar 44 miliar. Kemudian, aset peralatan dan mesin Rp174 miliar, gedung dan bangunan Rp233 miliar lebih. Kemudian jalan irigasi dan jaringan Rp354 miliar lebih. Aset tetap lainnya sebesar Rp16 miliar serta konstruksi dalam pekerjaan Rp2 miliar lebih. (fia)